

**DOKUMEN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )**



**Oleh: TIM KERJA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )  
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI**

**BKD DIY**

**TAHUN 2021**

**PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2021**

Mengetahui  
KEPALA BALAI PENGUKURAN  
KOMPETENSI PEGAWAI



Drs. ARIS WIDARYANTO, M.M  
NIP. 197402121993021001

Yogyakarta, 18 Maret 2021  
Ketua Tim Pembangunan ZI



SOFFI INDRIYANI, SE., M.Acc  
NIP. 198005012005022001

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI  
(WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (BBM) BALAI  
PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI**

**TAHUN 2021**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya **pembangunan Zona Integritas**. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;